



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

2025



JL. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311



dukcapilonline.wonosobokab.go.id



+62 811-2934-644



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas dalam Laporan Kinerja merujuk pada kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja dan menggambarkan seberapa baik dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana penggunaan sumber daya yang diberikan dan dikelola dengan transparan.

Laporan kinerja menyajikan dan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Laporan kinerja ini menjadi alat untuk memberikan informasi kepada publik mengenai sejauh mana perangkat daerah efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan.

1.2. Tujuan Pelaporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan Kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi. Terkait dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan tiga fungsi, yaitu:

a. Fungsi Hukum

Pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran.

b. Fungsi Statistik

Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran.

c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan

Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait. Data kependudukan yang lengkap dan akurat dapat dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah.

Adapun yang merupakan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pencatatan biodata Penduduk;
- 2) Penerbitan Kartu Keluarga;
- 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 4) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 5) Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
- 6) Pendataan Pendudukn rentan Administrasi Kependudukan



b. Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Kelahiran;
- 2) Lahir mati;
- 3) Perkawinan;
- 4) Pembatalan perkawinan;
- 5) Perceraian;
- 6) Pembatalan perceraian;
- 7) Kematian;
- 8) Pengangkatan anak;
- 9) Pengakuan anak;
- 10) Pengesahan anak;
- 11) Perubahan nama;
- 12) Perubahan status kewarganegaraan;
- 13) Peristiwa penting lainnya;
- 14) Pembetulan akta; dan
- 15) Pembatalan akta.

c. Data Kependudukan

- 1) Data perorangan; dan
- 2) Data Agregat

Adanya Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan apa yang telah diamanatkan dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatam Sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang merupakan hak bagi seluruh warga negara.

1.4. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan



pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dapat dijelaskan bahwa menurut Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Adapun susunan organisasi dinas dan uraian ringkas mengenai tugas masing – masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat. Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan lingkungan Dinas.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pencatatan sipil, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan,



pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang ketrampilan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau jabatan pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) ASN (16 (enam belas) ASN PNS dan 21 (dua puluh satu) ASN PPPK) dan 19 (sembilan belas) Non ASN.

1.5. Isu Strategis

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA’, khususnya misi 1 yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Misi pelayanan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
3. Membangun data base kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatarbelakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Sesuai RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021- 2026 maka strategi yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik melalui pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan dengan prioritas pada :
 - a. Peningkatan layanan akta kelahiran dan KIA;
 - b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. Jemput bola administrasi kependudukan, terutama untuk penduduk rentan; dan
 - d. Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan melalui peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dengan prioritas pada :
 - a. Updating data kependudukan;
 - b. Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - c. Ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.

Adapun isu strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerja sama dan bersinerdi dengan pihak terkait.



2. Pengembangan dan pemanfaatan sistem pelayanan kependudukan secara digital mengikuti perkembangan teknologi.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.
4. Perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat yang berpengaruh pda daerah, yaitu daerah tidak bisa mengolah data sendiri, sehingga harus mengajukan permohonan ke pusat. Hal ini menyebabkan penyajian data kependudukan menjadi lama.
5. Perlunya peningkatan kompetensi para petugas pelayanan seiring kemajuan teknologi.
6. Sarana prasa pelayanan adminduk yang masih belum memadai, karena sudah banyak alat yang rusak dan banyak perlu pembaruan sistem mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
7. Mobilisasi penduduk yang tinggi menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan tertip administrasi kependudukan, sehingga harus diimbangi dengan pendataan penduduk yang baik.

Peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi isu strategis dan Visi Misi daerah bisa dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 1

Visi, Misi Daerah dan Peran Strategis

Visi : Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik. 2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi	1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. 2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. 3. Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memiliki Visi sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Adapun Visi Kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo diperlukannya misi yang harus dipenuhi agar Visi tercapai. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terletak pada Misi 1 Kabupaten Wonosobo yaitu :

“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.



Misi pelayanan adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
- c. Membangun database kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

B. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikator yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel.

2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$$

2. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

3. Rasio Kepemilikan KIA usia 0 – 16 Tahun. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:



$$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$$

4. Rasio Kepemilikan Akta Kematian. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah data Perubahan penduduk karena kematian}} \times 100\%$$

5. Persentase Penduduk Rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen}}{\text{Jumlah Penduduk Rentan}} \times 100\%$$

6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Selisih antar jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan tahun } N \text{ dan tahun } N-1}{\text{Jumlah data yang memanfaatkan data kependudukan tahun } N-1} \times 100\%$$

7. Persentase Cakupan Updating Data Kependudukan. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang selesai updating}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

8. Persentase Ketersediaan Agregat Data Kependudukan untuk Kebutuhan Perencanaan Makro dan Sektorial yang dapat diakses. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah data agregat kependudukan yang dapat diakses}}{\text{Jumlah agregat data kependudukan}} \times 100\%$$

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nilai SAKIP

2.3. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi kependudukan untuk pelayanan publik.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi



B. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :

1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

C. Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

D. Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang sesuai dengan Renstra tahun 2021 – 2026, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;



9. Peayanan Pencatatan Sipil;
10. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
11. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 2

Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025
(1)	(2)	(3)
1. Pendaftaran Penduduk	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	99,21
	2. Rasio Kepemilikan KIA (usia 0-16 Tahun)	61,87
	3. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	100
2. Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	98,68
	2. Rasio Kepemilikan Akta Kematian	82,52
3. Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan kependudukan	75
	2. Persentase cakupan updating data kependudukan	100
	3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100
4. Penunjang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40
	2. Nilai Evaluasi SAKIP	74,90



2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan memberikan gambaran mengenai sasaran, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025.

Tabel 3

Rencana Kinerja Tahunan

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tahun : 2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	99,21
	2. Rasio Kepemilikan KIA;	61,87
	3. Rasio kepemilikan akta kematian;	100
	4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran;	98,68
	5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	82,52
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan;	75
	2. Persentase cakupan updating data kependudukan;	100
	3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40
	2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,90



2.5 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada RKT tahun 2025. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel 4.

Tabel 4

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	99,21
		2. Rasio Kepemilikan KIA;	61,87
		3. Rasio kepemilikan akta kematian;	100
		4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran;	98,68
		5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	82,52
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan;	75
		2. Persentase cakupan updating data kependudukan;	100
		3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40
		2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,90

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.750.545.595
2.	Pendaftaran Penduduk	1.065.000.000
3.	Pencatatan Sipil	185.000.000
4.	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	130.149.360
Total Anggaran		8.130.694.955



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan pada triwulan I tahun 2025.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi merujuk pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, target, atau hasil yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan fungsinya serta kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misinya. Capaian kinerja organisasi biasanya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi/perangkat daerah, dan menjadi penilaian kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan pertama tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 5

Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi kinerja (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	99,21	99,35	100,14
	2. Rasio Kepemilikan KIA;	61,87	64,23	103,81
	3. Rasio kepemilikan akta kematian;	100	100	100
	4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran;	98,68	98,93	100,25
	5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	82,52	85,17	103,21
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan;	75	7,14	9,52
	2. Persentase cakupan updating data kependudukan;	100	100	100
	3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan;	100	100	100
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40	94,22	100,88
	2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,90	0	0
Rata Rata Indikator Kinerja Triwulan Pertama				81,78

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat diketahui bahwa capaian rata-rata indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan pertama tahun 2025 sebesar **81,78** %. Berikut penjelasan masing – masing indikator :



1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, meliputi indikator :

a. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK

Berdasarkan pengukuran kinerja kepemilikan KTP menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el dengan realisasi kinerja 99,35 % dari target 99,21 %. Realisasi kinerja yang sudah melebihi target dikarenakan optimalnya kegiatan jemput bola perekaman KTP bagi pemula yang dilakukan di SMA. Selain itu kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP sebagai dokumen kependudukan yang digunakan di semua layanan publik.

b. Rasio Kepemilikan KIA

Berdasarkan pengukuran kinerja kepemilikan KIA menunjukkan belum tercapainya target kepemilikan KIA dengan realisasi kinerja 64,23 % dari target kinerja 61,87 %. Tercapainya target kinerja kepemilikan KIA pada triwulan I tahun 2025 didukung oleh kegiatan jemput bola KIA yang sudah berjalan di awal tahun. Selain itu, adanya kerjasama kemitraan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan pelaku UMKM yang menggunakan KIA sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan potongan harga jika bertransaksi di UMKM yang sudah melakukan perjanjian kerjasama.

c. Rasio kepemilikan akta kematian

Tercapainya target penerbitan Akta kematian ,yaitu 100 %, merupakan hasil dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan capaian penerbitan Akta Kematian. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pelayanan jemput bola, pemutakhiran data kependudukan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian bagi penduduk yang sudah meninggal. Selain itu juga meningkatkan sosialisasi dan berkoordinasi dengan petugas administrasi desa untuk melaporkan peristiwa kematian dalam Buku Pokok Pemakaman sekaligus melampirkan persyaratan penerbitan Akta Kematian.

d. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran

Cakupan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun ditargetkan 98,68 % dan tercapai 98,93 % dapat diartikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bisa melampaui target kinerja.



Hal ini bisa dicapai dengan adanya sinergi yang baik dari terintegrasinya pelayanan.

e. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, bahwa pengertian Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. Termasuk di dalamnya Orang terlantar dan Komunitas Terpencil. Dalam hal penduduk rentan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi korban bencana alam, penyandang disabilitas, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim (desil 1). Dengan kriteria tersebut, di Kabupaten Wonosobo terdapat penduduk rentan sejumlah 165.273 orang, dan dari data tersebut sudah terlayani atau terealisasi sebesar 85,17 %, melampaui dari target yaitu 82,52 %.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, meliputi indikator :

a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan

Pada tahun 2025 jumlah perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertambah 1 (satu) perangkat daerah sehingga menjadi 15 (lima belas) perangkat daerah. Selain dengan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta dan mitra usaha / umkm.

b. Persentase cakupan updating data kependudukan

Hasil cakupan updating data kependudukan diperoleh dari jumlah kecamatan yang diperbarui dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu melayani permohonan pembaruan data penduduk untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo



melalui petugas operator pelayanan di kecamatan. Jadi bisa dikatakan bahwa capaian cakupan updating data kependudukan adalah 100 % karena sudah melayani permohonan pembaruan data untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan pemutakhiran data di desa se –Kabupaten Wonosobo juga turut menjadi upaya dalam tercapainya realisasi kinerja updating data kependudukan Kabupaten Wonosobo.

c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan

Sesuai Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat 28 jenis data agregat kependudukan dan seluruhnya bisa diakses.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi indikator :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penting untuk mengukur sejauh mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Pada tahun 2025 pengumpulan data survei menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai arahan dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 060/10575/Org yang mengatur mengenai kewajiban pengumpulan data SKM secara digital. Nilai rata – rata IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan pertama tahun 2025 mendapat nilai 94,22 lebih tinggi dari target kinerja yaitu 93,4.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan pertama tahun 2025 melalui 9 unsur pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan bahwa kinerja yang perlu ditingkatkan adalah waktu penyelesaian, spesifikasi jenis layanan, sistem mekanisme dan prosedur pengajuan merupakan unsur nilai paling rendah. Adapun sarana prasarana, waktu penyelesaian, dan kompetensi pelaksana menjadi unsur yang paling berpengaruh terhadap semua unsur lainnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

b. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Wonosobo pada triwulan pertama tahun 2025 belum tersedia karena dalam proses penilaian.

3.2. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 melalui APBD telah mengalokasi anggaran untuk Program kegiatan sebesar Rp8.13.694.955. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, pada triwulan pertama tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp1.200.926.989 atau 14,77 %. Capaian realisasi anggaran setiap program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	1.065.000.000	60.568.534	5,69
2.	Program Pencatatan Sipil	185.000.000	-	-
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	130.149.360	1.275.000	0,98
Jumlah Anggaran Kegiatan		1.380.149.360	61.843.534	4,48
Anggaran Program Penunjang		6.750.545.595	1.139.083.455	16,87
Belanja total		8.130.694.955	1.200.926.989	14,77

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (diolah)

3.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Pendanaan untuk Program Pendaftaran Penduduk pada triwulan I tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.065.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 60.568.534 atau 5,69 %.

Program Pendaftaran Penduduk bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pendaftaran kependudukan. Tujuan kegiatan pelayanan



pendaftaran penduduk adalah untuk mencatat, mengelola, dan mendokumentasikan data kependudukan setiap warga negara atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah, guna mendukung berbagai kepentingan administrasi dan perencanaan pembangunan. Pelayanan pendaftaran penduduk mencakup proses pembuatan dokumen kependudukan yang meliputi biodata, KTP/KIA, KK, pindah datang, perubahan identitas, dan peristiwa kependudukan lainnya, dengan tujuan utama untuk memastikan kepemilikan dokumen kependudukan dengan adanya data yang akurat dan terbaru.

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya berkaitan dengan Sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana penerbitan dokumen kependudukan. Pemenuhan sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk penyediaan tenaga Non ASN sebagai operator cetak dokumen kependudukan. Disamping itu, tenaga operator juga dioptimalkan dalam seluruh proses pelayanan kependudukan antara lain menerima permohonan, verifikasi berkas permohonan, input data, cetak dokumen, serta distribusi dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan jemput bola pelayanan adminduk ke sekolah, kampung/perumahan dan pelayanan adminduk bagi penduduk rentan, seperti lansia, orang sakit, disabilitas dan ODGJ.

2. Program Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran pada Program Pencatatan Sipil pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp185.000.000 dan belum direalisasikan karena program pencatatan sipil dilaksanakan mulai di triwulan kedua tahun 2025.

Pencatatan sipil merupakan salah satu tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil didefinisikan sebagai pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting tersebut antara lain:

- a. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukumpendukung hak dan kewajiban.



- b. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
- c. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.
- d. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp130.149.360. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sudah direalisasikan sebesar Rp1.275.000 atau 0,98 %.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan. Capaian program meliputi meningkatnya persentase cakupan updating data kependudukan, ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral, juga untuk meningkatkan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan.

Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. Pengumpulan data kependudukan merupakan proses untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai administrasi kependudukan. Data yang dihasilkan selanjutnya diolah dan disajikan dalam format yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Kegiatan ini penting untuk membangun database kependudukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam perencanaan, kebijakan, serta pelayanan publik.

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- a. Pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.



- b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
- d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Sejalan dengan terbangunnya data dasar kependudukan, maka dalam pemanfaatan data kependudukan perlu dilakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Pengolahan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan perlengkapan maupun pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), serta penyajian data kependudukan sehingga data dapat dipilah sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan. Disamping itu, terkait dengan pihak yang akan memanfaatkan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana maupun pengguna data lainnya, sudah diatur tentang hak akses atas pemanfaatan data kependudukan. Hak akses dimaksud antara lain mensyaratkan adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

3.4. Hambatan dan Evaluasi

1. Hambatan

Hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Layanan online yang berbasis elektronik rentan terhadap perentasan dari pihak luar. Serangan siber beberapa kali menyerang aplikasi layanan online sehingga menghambat sistem pelayanan dalam beberapa hari.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasana yang belum dilakukan secara rutin, sehingga beberapa perangkat layanan seperti komputer mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer yang tidak maksimal.



- c. Masyarakat yang belum atau kurang menguasai teknologi informasi, sehingga kesulitan dalam melakukan pengajuan permohonan dokumen kependudukan.

2. Evaluasi

Dalam proses pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertransformasi dari stelsel pasif ke stelsel aktif, yang berarti bahwa dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif melakukan pelayanan jemput bola mendatangi rumah penduduk.

Menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, di akhir tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meluncurkan aplikasi bernama PANDAWA SAKTI yang menjadikan sistem pelayanan online. Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan meminimalisir calo karena hanya bisa diakses oleh akun pemohon, dan apabila bukan yang bersangkutan maka diarahkan untuk mengurus melalui petugas administrasi desa “Pesta Dansa”. Melalui aplikasi ini pemohon dapat mencetak dokumen administrasi kependudukan secara mandiri (selain KTP dan KIA) setelah memperoleh pemberitahuan berupa barcode dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui email.

Dalam pelayanan publik, hal yang paling mendasar adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan. Apabila masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik dari pelaksana dan penyelenggara pelayanan maka masyarakat berhak memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan. Demikian juga apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, masyarakat dapat mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik atau kepada kepala pembina penyelenggara layanan.

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban pertama yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Selain itu,



masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif serta mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hakekat pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis. Pelayanan publik yang baik, adalah wujud kerja sama yang baik antara pelaksana, penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik..

3.5. Inovasi Pelayanan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo membuat inovasi pelayanan , yaitu :

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a. Pelayanan perekaman keliling KTP-el bagi penduduk rentan: yang mengalami sakit/Jompo/disabilitas/miskin
- b. Pelayanan perekaman keliling /Jemput bola KIA ke sekolah-sekolah SD/MI
- c. Jemput Bola Perekaman KTP-el dan Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa-des.

2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.

- a. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Pelayanan melalui pelayanan website.
- b. Pemutakhiran Data kartu keluarga.
- c. MoU/kerja sama dengan rumah sakit dan bidan bersalin dalam penerbitan Dokumen Akte Kelahiran.

3. Sekretariat

- a. Penyediaan jalur pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- b. Penyediaan ruang khusus Laktasi.
- c. Penyediaan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas.
- d. Penyediaan kamar mandi disabilitas.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian :

1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK mencapai 99,35 %
2. Rasio kepemilikan KIA mencapai 64,23 %
3. Rasio kepemilikan akta kematian mencapai 100 %
4. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen mencapai 85,17 %
5. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 98,93 %
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan mencapai 7,14 %
7. Persentase cakupan updating data kependudukan mencapai 100 %
8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses mencapai 100 %
9. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 94,22
10. Nilai SAKIP belum tersedia

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.200.926.989 atau 14,77% dari anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban instansi atas kinerja selama 3 bulan anggaran yang telah dilaksanakan dalam tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama serta koordinasi dan sinergi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan penduduk.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi sistem layanan daring dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai media;



2. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat ;
3. Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja ;
4. Meningkatkan kompetensi petugas dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal keamanan data menghadapi serangan siber.
5. Koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan penduduk rentan untuk mendapatkan data sasaran pelayanan adminduk.
6. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
7. Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.

Wonosobo, 23 April 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el
disdukcapil@wonosobokab.go.id

KEPEMILIKAN KTP

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025				s.d. Juni 2025				s.d. Sept 2025				s.d. Des 2025			
		JUMLAH WAJIB KTP	BLM MEMILIKI KTP	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP	BLM MEMILIKI KTP (PRR+BLM REKAM)	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP (DINAMIS)	BLM MEMILIKI KTP (PRR+BLM REKAM)	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP (DINAMIS)	BLM MEMILIKI KTP (PRR+BLM REKAM)	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN
330701	WADASLINTANG	50.509	356	50.153	99,30%												
330702	KEPIL	52.656	353	52.303	99,33%												
330703	SAPURAN	50.065	347	49.718	99,31%												
330704	KALIWIRO	43.619	198	43.421	99,55%												
330705	LEKSONO	37.146	187	36.959	99,50%												
330706	SELOMERTO	43.145	248	42.897	99,43%												
330707	KALIKAJAR	57.784	466	57.318	99,19%												
330708	KERTEK	71.744	526	71.218	99,27%												
330709	WONOSOBO	73.126	387	72.739	99,47%												
330710	WATUMALANG	45.681	308	45.373	99,33%												
330711	MOJOTENGAH	52.314	322	51.992	99,38%												
330712	GARUNG	45.059	263	44.796	99,42%												
330713	KEJAJAR	36.430	315	36.115	99,14%												
330714	SUKOHARJO	28.766	188	28.578	99,35%												
330715	KALIBAWANG	22.714	144	22.570	99,37%												
JUMLAH		710.758	4.608	706.150	99,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 10 APRIL 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el
disdukcapil@wonosobokab.go.id

KEPEMILIKAN KIA

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025				s.d. Juni 2025				s.d. Sept 2025				s.d. Des 2025			
		MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	UMUR 0-17	PERSENTA SE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17	PERSENT ASE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17 (DINAMIS)	PERSENT ASE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17 (DINAMIS)	PERSENT ASE (%)
330701	WADASLINTANG	8.834	6.580	15.414	57,31%												
330702	KEPIL	8.958	8.009	16.967	52,80%												
330703	SAPURAN	9.368	6.991	16.359	57,27%												
330704	KALIWIRO	8.681	4.257	12.938	67,10%												
330705	LEKSONO	7.238	4.799	12.037	60,13%												
330706	SELOMERTO	8.964	5.463	14.427	62,13%												
330707	KALIKAJAR	12.135	7.545	19.680	61,66%												
330708	KERTEK	17.571	7.785	25.356	69,30%												
330709	WONOSOBO	16.142	8.276	24.418	66,11%												
330710	WATUMALANG	9.465	5.088	14.553	65,04%												
330711	MOJOTENGAH	11.481	7.356	18.837	60,95%												
330712	GARUNG	12.573	3.722	16.295	77,16%												
330713	KEAJAR	9.698	3.109	12.807	75,72%												
330714	SUKOHARJO	6.444	2.138	8.582	75,09%												
330715	KALIBAWANG	3.875	3.226	7.101	54,57%												
JUMLAH		151.427	84.344	235.771	64,23%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

AKTA KEMATIAN

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025			s.d. Juni 2025			s.d. Sept 2025			s.d. Des 2025		
		JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN
330701	WADASLINTANG	114	114	100,00%									
330702	KEPIL	98	98	100,00%									
330703	SAPURAN	94	94	100,00%									
330704	KALIWIRO	71	71	100,00%									
330705	LEKSONO	80	80	100,00%									
330706	SELOMERTO	73	73	100,00%									
330707	KALIKAJAR	80	80	100,00%									
330708	KERTEK	100	100	100,00%									
330709	WONOSOBO	165	165	100,00%									
330710	WATUMALANG	79	79	100,00%									
330711	MOJOTENGAH	84	84	100,00%									
330712	GARUNG	75	75	100,00%									
330713	KEAJAR	65	65	100,00%									
330714	SUKOHARJO	74	74	100,00%									
330715	KALIBAWANG	22	22	100,00%									
JUMLAH		1.274	1.274	100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-

Sumber: Data Agregat - Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412

Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el *disdukcapil@wonosobokab.go.id*

**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
DARI DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI**

1. AGR_AGAMA_UMUR_TUNGGAL3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
2. AGR_AGAMA_VERT3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
3. AGR_DISABILITAS_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
4. AGR_GOLONGAN_DARAH3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
5. AGR_JK_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
6. AGR_JK_KEL_UMUR3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
7. AGR_JK KEPADATAN_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
8. AGR_JK_UMUR_TUNGGAL3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
9. AGR_KELOMPOK_PKRJN3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
10. AGR_KELOMPOK_PKRJN_UMUR_TUNGGAL3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
11. AGR_KEPKEL_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
12. AGR_KEPKEL_AGAMA_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
13. AGR_KEPKEL_PDDKN_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
14. AGR_KEPKEL_PKRJN_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
15. AGR_KEPKEL_STAT_KWN_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
16. AGR_KEPKEL_STKWN_UMR_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
17. AGR_KEPKEL_UMUR_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
18. AGR_KEPKEL_UMUR_TUNGGAL_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
19. AGR_PDDKN_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
20. AGR_PKRJN3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
21. AGR_SHBKEL_3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
22. AGR_STAT_KWN_KEL_UMUR3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
23. AGR_STAT_KWN_UMUR_TUNGGAL3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
24. AGR_STAT_KWN_VERT3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
25. AGR_USIA_PRODUKTIF_NON_PRODUKTIF3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
26. AGR_USIA_PRODUKTIF_PKRJN3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
27. AGR_USIA_SEKOLAH3307_KAB. WONOSOBO.xlsx
28. AGR_WKTP3307_KAB. WONOSOBO.xlsx

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DISDUKCAPIL DENGAN OPD/ LEMBAGA LAIN

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/ KOMITMEN	TENTANG
1	RSUD	29-12-2021	470/1450/Disdukcapil/2021 019./1992/XII/RSUD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
2	BPPKAD	29-12-2021	470/1451/Disdukcapil/2021 470/1919/BPPKAD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
3	DINKES	12-03-2021	470/262/Disdukcapil 440/512/Dinkes	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran anak/ bayi Usia 1 sampai dengan 60 hari, KK dan KIA
4	DPPKBPPPA	13-06-2022	470/677/Disdukcapil/2022 445/478.e/2022/DPPKBPPPA	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
5	PENGADILAN AGAMA	20-04-2022	W11-A8/1208/HM.01.1/4/2022 134.3/06/NK/2022	Nota Kesepakatan Bersama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
		16-05-2023	W11-A8/1358/HM.01.1/V/2023 470/1178/Disdukcapil/V/2023	Komitmen Besama Pelayanan "Pohon Kaktus Teratai" (Permohonan Perubahan Status Terjadi Karena Cerai)

		18-04-2024	012/PKUWSB/J/III/2024 470/0791/Disdukcapil/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara RS PKU dengan Disdukcapil tentang "Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi"
		18-04-2024	013/PKUWSB/J/III/2024 470/0792/Disdukcapil/2024	Komitmen Bersama Antara RS PKU dengan Disdukcapil tentang LAYANAN ID-KIDs AKIKAHKU "Layanan Identitas Anak Terintegrasi: Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga di PKU"
10	RS AISs	12-09-2024+C60	273/KB/RS AISs/IX/2024 100.3.7.1/KB/14/2024	Kesepakatan Bersama Antara RSU AISs Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan, Stunting dan Optimalisasi Layanan Sosial, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12-09-2024	274/PKS/RS AISs/IX/2024;	Perjanjian Kerjasama Antara RSU AISs Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
			470/2345/Disdukcapil	
11	CV ANGGREK INDO RAYA	19-12-2024	470/3201/Disdukcapil/2024 001/SK/XII/AG/2024	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan CV Anggrek Indo Raya tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak
12	CV RATNA	19-12-2024	470/3202/Disdukcapil/2024 001/SK/XII/RATNA	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan CV Ratna tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak
13	HAPPY MOM & BABY CARE	19-12-2024	470/3203/Disdukcapil/2024 03/MNP/XII/2024	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Happy Mom & Baby Care tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak
14	MONGS SEBLAK	19-12-2024	470/3204/Disdukcapil/2024	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Mongs Seblak tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak

			01/MS/12/2024	
15	RSI	20-03-2025	460/PKS/023/RSI/III/2025 100.3.7.1/KB/02/2025	Kesepakatan Bersama Antara RSI Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan, Stunting dan Optimalisasi Layanan Sosial, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		20-03-2025	470/PKS/024/RSI/III/2025 470/0626/Disdukcapil	Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Islam Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi

Wonosobo, 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

CAKUPAN UPDATING DATA KEPENDUDUKAN

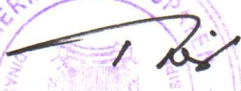
Periode Januari s.d. Maret 2025

KODE WILAYAH	WILAYAH	Update data Kependudukan Jan s.d. September 2024								
		Kelahiran	Kematian	Pindah	Datang	Perubahan KK	Penerbitan KK Baru	Penerbitan NIK Baru	Jumlah Update	%
330701	WADASLINTANG	232	114	301	242	313	191	146	1.539	100,00%
330702	KEPIL	223	98	212	188	281	149	170	1.321	100,00%
330703	SAPURAN	208	94	166	172	322	183	177	1.322	100,00%
330704	KALIWIRO	176	71	248	168	263	131	131	1.188	100,00%
330705	LEKSONO	153	80	204	148	231	127	122	1.065	100,00%
330706	SELOMERTO	203	73	207	238	282	152	155	1.310	100,00%
330707	KALIKAJAR	280	80	223	216	320	163	232	1.514	100,00%
330708	KERTEK	330	100	254	283	432	237	282	1.918	100,00%
330709	WONOSOBO	280	165	519	486	679	249	234	2.612	100,00%
330710	WATUMALANG	191	79	168	154	265	133	159	1.149	100,00%
330711	MOJOTENGAH	224	84	228	244	316	202	180	1.478	100,00%
330712	GARUNG	241	75	156	191	297	137	195	1.292	100,00%
330713	KEAJAR	168	65	131	108	214	101	125	912	100,00%
330714	SUKOHARJO	104	74	154	113	221	116	80	862	100,00%
330715	KALIBAWANG	102	22	108	62	251	71	74	690	100,00%
JUMLAH		3.115	1.274	3.279	3.013	4.687	2.342	2.462	20.172	100%

Sumber: Data Agregat Pelayanan

WONOSOBO, 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO


TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412

Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412

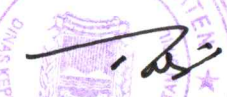
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el

disdukcapil@wonosobokab.go.id

KODE	WILAYAH	Data Disabilitas Dinsos			DATA DESIL									TOTAL		
		ODGJ	Disabilitas	Jumlah Terlayani	TOTAL DESIL 1			DESIL 1 TERLAYANI KTP			DESIL 1 TERLAYANI KIA			JML PENDUDUK RENTAN	TERLAYAN I	%
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
330701	WADASLINTANG	251	324	65	4.633	4.278	8.911	3.397	3.160	6.557	694	615	1.309	9.486	7.931	83,61%
330702	KEPIL	222	126	87	10.653	9.525	20.178	7.851	7.092	14.943	1.319	1.215	2.534	20.526	17.564	85,57%
330703	SAPURAN	164	362	53	8.570	7.442	16.012	6.410	5.546	11.956	1.037	943	1.980	16.538	13.989	84,59%
330704	KALIWIRO	139	192	39	3.648	3.259	6.907	2.745	2.468	5.213	600	539	1.139	7.238	6.391	88,30%
330705	LEKSONO	181	202	96	1.855	1.681	3.536	1.349	1.218	2.567	274	260	534	3.919	3.197	81,58%
330706	SELOMERTO	230	339	66	2.084	1.981	4.065	1.462	1.407	2.869	318	318	636	4.634	3.571	77,06%
330707	KALIKAJAR	238	369	49	10.764	9.636	20.400	7.806	6.962	14.768	1.624	1.450	3.074	21.007	17.891	85,17%
330708	KERTEK	226	413	128	7.394	6.812	14.206	5.158	4.663	9.821	1.357	1.299	2.656	14.845	12.605	84,91%
330709	WONOSOBO	295	497	155	2.852	2.586	5.438	1.949	1.774	3.723	496	471	967	6.230	4.845	77,77%
330710	WATUMALANG	46	220	43	7.065	6.359	13.424	5.282	4.549	9.831	1.135	1.126	2.261	13.690	12.135	88,64%
330711	MOJOTENGAH	169	356	35	7.622	6.601	14.223	5.511	4.592	10.103	1.186	1.136	2.322	14.748	12.460	84,49%
330712	GARUNG	256	72	57	7.064	6.245	13.309	4.956	4.348	9.304	1.533	1.431	2.964	13.637	12.325	90,38%
330713	KEAJAR	147	249	22	4.341	3.788	8.129	2.946	2.530	5.476	1.013	931	1.944	8.525	7.442	87,30%
330714	SUKOHARJO	164	411	28	1.713	1.540	3.253	1.275	1.181	2.456	337	285	622	3.828	3.106	81,14%
330715	KALIBAWANG	89	247	31	3.227	2.859	6.086	2.454	2.110	4.564	361	350	711	6.422	5.306	82,62%
JUMLAH		2.817	4.379	954	83.485	74.592	158.077	60.551	53.600	114.151	13.284	12.369	25.653	165.273	140.758	85,17%

Sumber: Data Lintas Sektor dan Data Pelayanan

WONOSOBO, 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO


TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno – Hatta No. 8 Wonosobo, KodePos 56311 Telp. (0286) 321412
Telepon (0286) 321412, Faksimile (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el
disdukcapil@wonosobokab.go.id

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK DI KABUPATEN WONOSOBO

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025				s.d. Juni 2025				s.d. Sept 2025				s.d. Des 2025			
		JUMLAH ANAK 0 - 18	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 - 18	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 -18 (DINAMIS)	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 -18 (DINAMIS)	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN
330701	WADASLINTANG	16.126	234	15.892	98,55%												
330702	KEPIL	17.725	232	17.493	98,69%												
330703	SAPURAN	17.002	168	16.834	99,01%												
330704	KALIWIRO	13.529	110	13.419	99,19%												
330705	LEKSONO	12.573	117	12.456	99,07%												
330706	SELOMERTO	15.086	138	14.948	99,09%												
330707	KALIKAJAR	20.468	234	20.234	98,86%												
330708	KERTEK	26.463	305	26.158	98,85%												
330709	WONOSOBO	25.472	273	25.199	98,93%												
330710	WATUMALANG	15.214	130	15.084	99,15%												
330711	MOJOTENGAH	19.546	249	19.297	98,73%												
330712	GARUNG	16.933	103	16.830	99,39%												
330713	KEAJAR	13.341	152	13.189	98,86%												
330714	SUKOHARJO	8.959	64	8.895	99,29%												
330715	KALIBAWANG	7.389	121	7.268	98,36%												
JUMLAH		245.826	2.630	243.196	98,93%	-	-	-		-	-	-		-	-	-	

Sumber: Subdit Penyajian Data Admuduk

WONOSOBO, 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO


TARJO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Maret

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp8.130.694.955,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp89.654.951,00	Rp58.189.928,00	Rp147.844.879,00	Rp1.200.926.989,00	Rp6.929.767.966,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.865.794.955,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp89.654.951,00	Rp58.189.928,00	Rp147.844.879,00	Rp1.200.926.989,00	Rp6.664.867.966,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp5.117.045.595,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.322.110,00	Rp4.141.723.485,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.748.749.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp89.654.951,00	Rp58.189.928,00	Rp147.844.879,00	Rp225.604.879,00	Rp2.523.144.481,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp264.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp264.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp204.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.900.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Rp8.130.694.955,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp89.654.951,00	Rp58.189.928,00	Rp147.844.879,00	Rp1.200.926.989,00	Rp6.929.767.966,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.750.545.595,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp71.347.128,00	Rp49.214.217,00	Rp120.561.345,00	Rp1.139.083.455,00	Rp5.611.462.140,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp40.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp40.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.117.045.595,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.322.110,00	Rp4.141.723.485,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.117.045.595,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.322.110,00	Rp4.141.723.485,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.117.045.595,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.322.110,00	Rp4.141.723.485,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp5.117.045.595,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.322.110,00	Rp4.141.723.485,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.905.996.618,00	Rp328.311.602,00	Rp339.125.096,00	Rp667.436.698,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp667.436.698,00	Rp2.238.559.920,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.030.354.520,00	Rp263.479.800,00	Rp262.338.031,00	Rp525.817.831,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp525.817.831,00	Rp1.504.536.689,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.089.006.240,00	Rp138.583.000,00	Rp139.310.000,00	Rp277.893.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.893.000,00	Rp811.113.240,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp941.348.280,00	Rp124.896.800,00	Rp123.028.031,00	Rp247.924.831,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.924.831,00	Rp693.423.449,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp257.818.579,00	Rp24.229.844,00	Rp24.443.607,00	Rp48.673.451,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.673.451,00	Rp209.145.128,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp126.029.820,00	Rp13.620.948,00	Rp13.671.638,00	Rp27.292.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.292.586,00	Rp98.737.234,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp131.788.759,00	Rp10.608.896,00	Rp10.771.969,00	Rp21.380.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.380.865,00	Rp110.407.894,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp135.249.100,00	Rp14.610.000,00	Rp14.610.000,00	Rp29.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.220.000,00	Rp106.029.100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp135.249.100,00	Rp14.610.000,00	Rp14.610.000,00	Rp29.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.220.000,00	Rp106.029.100,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp174.560.000,00	Rp5.280.000,00	Rp5.280.000,00	Rp10.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.560.000,00	Rp164.000.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp174.560.000,00	Rp5.280.000,00	Rp5.280.000,00	Rp10.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.560.000,00	Rp164.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp35.384.100,00	Rp5.750.000,00	Rp2.190.000,00	Rp7.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.940.000,00	Rp27.444.100,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp25.664.100,00	Rp2.190.000,00	Rp2.190.000,00	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.000,00	Rp21.284.100,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp9.720.000,00	Rp3.560.000,00	Rp0,00	Rp3.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.560.000,00	Rp6.160.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp148.630.319,00	Rp14.049.480,00	Rp14.037.410,00	Rp28.086.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.086.890,00	Rp120.543.429,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp57.346.357,00	Rp6.662.640,00	Rp6.662.640,00	Rp13.325.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.325.280,00	Rp44.021.077,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp91.283.962,00	Rp7.386.840,00	Rp7.374.770,00	Rp14.761.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.761.610,00	Rp76.522.352,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp123.500.000,00	Rp909.386,00	Rp16.222.169,00	Rp17.131.555,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.131.555,00	Rp106.368.445,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp123.500.000,00	Rp909.386,00	Rp16.222.169,00	Rp17.131.555,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.131.555,00	Rp106.368.445,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp500.000,00	Rp3.092,00	Rp3.879,00	Rp6.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.971,00	Rp493.029,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp300.000,00	Rp1.566,00	Rp1.491,00	Rp3.057,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.057,00	Rp296.943,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp200.000,00	Rp1.526,00	Rp2.388,00	Rp3.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.914,00	Rp196.086,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp2.211.048.977,00	Rp0,00	Rp307.885.412,00	Rp307.885.412,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.885.412,00	Rp1.903.163.565,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp870.078.030,00	Rp0,00	Rp116.446.694,00	Rp116.446.694,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.446.694,00	Rp753.631.336,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp464.937.840,00	Rp0,00	Rp64.415.980,00	Rp64.415.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.415.980,00	Rp400.521.860,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp405.140.190,00	Rp0,00	Rp52.030.714,00	Rp52.030.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.030.714,00	Rp353.109.476,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp35.353.902,00	Rp0,00	Rp16.768.687,00	Rp16.768.687,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.768.687,00	Rp18.585.215,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp35.353.902,00	Rp0,00	Rp16.768.687,00	Rp16.768.687,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.768.687,00	Rp18.585.215,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp1.305.617.045,00	Rp0,00	Rp174.670.031,00	Rp174.670.031,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.670.031,00	Rp1.130.947.014,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp697.906.760,00	Rp0,00	Rp96.623.961,00	Rp96.623.961,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.623.961,00	Rp601.282.799,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp607.710.285,00	Rp0,00	Rp78.046.070,00	Rp78.046.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.046.070,00	Rp529.664.215,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp519.997.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.020.000,00	Rp12.050.500,00	Rp34.070.500,00	Rp34.070.500,00	Rp485.927.000,00
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp95.108.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.108.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp59.674.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.674.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp20.322.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.322.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp19.895.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.895.700,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp39.997.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp38.197.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp39.997.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp38.197.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.997.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp38.197.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp31.247.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.247.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp31.247.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.247.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp19.247.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.247.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp8.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp6.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp8.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp6.950.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp6.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp2.445.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp2.445.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp2.445.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp2.445.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp2.445.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp555.000,00	Rp2.445.000,00
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp275.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.220.000,00	Rp10.495.500,00	Rp31.715.500,00	Rp31.715.500,00	Rp243.284.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp275.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.220.000,00	Rp10.495.500,00	Rp31.715.500,00	Rp31.715.500,00	Rp243.284.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp275.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.220.000,00	Rp10.495.500,00	Rp31.715.500,00	Rp31.715.500,00	Rp243.284.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp35.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp920.000,00	Rp34.830.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp35.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp920.000,00	Rp34.830.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp35.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp920.000,00	Rp34.830.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp239.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.300.000,00	Rp10.495.500,00	Rp30.795.500,00	Rp30.795.500,00	Rp208.454.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp239.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.300.000,00	Rp10.495.500,00	Rp30.795.500,00	Rp30.795.500,00	Rp208.454.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp223.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.550.000,00	Rp10.345.500,00	Rp29.895.500,00	Rp29.895.500,00	Rp193.604.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp150.000,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp14.850.000,00
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp525.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.475.000,00
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp217.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.000.000,00
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp217.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp214.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp204.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.900.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp197.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp135.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.350.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp135.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.350.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp62.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.050.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp60.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.050.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp646.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp39.756.248,00	Rp24.153.347,00	Rp63.909.595,00	Rp107.109.595,00	Rp539.190.405,00
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.590,00	Rp12.500,00	Rp25.090,00	Rp25.090,00	Rp4.974.910,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.590,00	Rp12.500,00	Rp25.090,00	Rp25.090,00	Rp4.974.910,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.590,00	Rp12.500,00	Rp25.090,00	Rp25.090,00	Rp4.974.910,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.590,00	Rp12.500,00	Rp25.090,00	Rp25.090,00	Rp974.910,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.590,00	Rp12.500,00	Rp25.090,00	Rp25.090,00	Rp974.910,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.590,00	Rp12.500,00	Rp25.090,00	Rp25.090,00	Rp974.910,00
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.916.023,00	Rp13.150.330,00	Rp25.066.353,00	Rp25.066.353,00	Rp124.933.647,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.916.023,00	Rp13.150.330,00	Rp25.066.353,00	Rp25.066.353,00	Rp124.933.647,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.916.023,00	Rp13.150.330,00	Rp25.066.353,00	Rp25.066.353,00	Rp124.933.647,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.916.023,00	Rp13.150.330,00	Rp25.066.353,00	Rp25.066.353,00	Rp124.933.647,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.916.023,00	Rp13.150.330,00	Rp25.066.353,00	Rp25.066.353,00	Rp124.933.647,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.214,00	Rp0,00	Rp76.214,00	Rp76.214,00	Rp1.923.786,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.360,00	Rp388.242,00	Rp665.602,00	Rp665.602,00	Rp2.834.398,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.936.007,00	Rp3.750.464,00	Rp11.686.471,00	Rp11.686.471,00	Rp58.313.529,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp74.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.626.442,00	Rp9.011.624,00	Rp12.638.066,00	Rp12.638.066,00	Rp61.861.934,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp491.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp27.827.635,00	Rp10.990.517,00	Rp38.818.152,00	Rp82.018.152,00	Rp409.281.848,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp491.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp27.827.635,00	Rp10.990.517,00	Rp38.818.152,00	Rp82.018.152,00	Rp409.281.848,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp491.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp27.827.635,00	Rp10.990.517,00	Rp38.818.152,00	Rp82.018.152,00	Rp409.281.848,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp60.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.379.000,00	Rp1.701.000,00	Rp3.080.000,00	Rp3.080.000,00	Rp57.370.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp60.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.379.000,00	Rp1.701.000,00	Rp3.080.000,00	Rp3.080.000,00	Rp57.370.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.000,00	Rp0,00	Rp230.000,00	Rp230.000,00	Rp2.770.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp24.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp206.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00	Rp24.164.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp569.000,00	Rp1.015.000,00	Rp1.584.000,00	Rp1.584.000,00	Rp13.416.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp7.020.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp430.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp26.448.635,00	Rp9.289.517,00	Rp35.738.152,00	Rp78.938.152,00	Rp351.911.848,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp404.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp25.170.000,00	Rp7.140.000,00	Rp32.310.000,00	Rp75.510.000,00	Rp329.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp280.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	Rp43.200.000,00	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp64.800.000,00	Rp216.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp46.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.570.000,00	Rp7.140.000,00	Rp10.710.000,00	Rp10.710.000,00	Rp35.700.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp77.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp16.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.278.635,00	Rp2.149.517,00	Rp3.428.152,00	Rp3.428.152,00	Rp12.811.848,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.006.800,00	Rp2.013.600,00	Rp3.020.400,00	Rp3.020.400,00	Rp10.979.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.815,00	Rp60.407,00	Rp181.222,00	Rp181.222,00	Rp818.778,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.020,00	Rp75.510,00	Rp226.530,00	Rp226.530,00	Rp1.013.470,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp244.202.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.570.880,00	Rp13.010.370,00	Rp22.581.250,00	Rp22.581.250,00	Rp221.621.250,00
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp149.202.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.495.880,00	Rp12.675.370,00	Rp22.171.250,00	Rp22.171.250,00	Rp127.031.250,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp149.202.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.495.880,00	Rp12.675.370,00	Rp22.171.250,00	Rp22.171.250,00	Rp127.031.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp149.202.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.495.880,00	Rp12.675.370,00	Rp22.171.250,00	Rp22.171.250,00	Rp127.031.250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.313.500,00	Rp0,00	Rp3.313.500,00	Rp3.313.500,00	Rp6.686.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.313.500,00	Rp0,00	Rp3.313.500,00	Rp3.313.500,00	Rp6.686.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.313.500,00	Rp0,00	Rp3.313.500,00	Rp3.313.500,00	Rp6.686.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp139.202.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.182.380,00	Rp12.675.370,00	Rp18.857.750,00	Rp18.857.750,00	Rp120.344.750,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp139.202.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.182.380,00	Rp12.675.370,00	Rp18.857.750,00	Rp18.857.750,00	Rp120.344.750,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.182.380,00	Rp12.445.370,00	Rp18.627.750,00	Rp18.627.750,00	Rp101.372.250,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp19.202.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.000,00	Rp230.000,00	Rp230.000,00	Rp18.972.500,00
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp335.000,00	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp19.590.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp335.000,00	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp19.590.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp335.000,00	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp19.590.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp18.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp335.000,00	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp18.290.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp18.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp335.000,00	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp18.290.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp5.925.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.000,00	Rp335.000,00	Rp335.000,00	Rp1.165.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.400.000,00
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1.065.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp18.307.823,00	Rp7.700.711,00	Rp26.008.534,00	Rp60.568.534,00	Rp1.004.431.466,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp915.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp18.307.823,00	Rp7.700.711,00	Rp26.008.534,00	Rp60.568.534,00	Rp854.431.466,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp915.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp18.307.823,00	Rp7.700.711,00	Rp26.008.534,00	Rp60.568.534,00	Rp854.431.466,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp915.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp18.307.823,00	Rp7.700.711,00	Rp26.008.534,00	Rp60.568.534,00	Rp854.431.466,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp915.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp18.307.823,00	Rp7.700.711,00	Rp26.008.534,00	Rp60.568.534,00	Rp854.431.466,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp557.878.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp557.878.176,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp557.878.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp557.878.176,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp112.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp50.183.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.183.150,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp507.582.826,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp507.582.826,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp257.221.824,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp18.157.823,00	Rp1.475.711,00	Rp19.633.534,00	Rp54.193.534,00	Rp203.028.290,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp236.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp51.840.000,00	Rp184.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp224.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp17.280.000,00	Rp34.560.000,00	Rp17.280.000,00	Rp0,00	Rp17.280.000,00	Rp51.840.000,00	Rp172.800.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp21.181.824,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp877.823,00	Rp1.475.711,00	Rp2.353.534,00	Rp2.353.534,00	Rp18.828.290,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp18.662.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.200,00	Rp1.382.400,00	Rp2.073.600,00	Rp2.073.600,00	Rp16.588.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.119.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.943,00	Rp41.471,00	Rp124.414,00	Rp124.414,00	Rp995.330,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.399.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.680,00	Rp51.840,00	Rp155.520,00	Rp155.520,00	Rp1.244.160,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp99.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp6.225.000,00	Rp6.375.000,00	Rp6.375.000,00	Rp93.525.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp99.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp6.225.000,00	Rp6.375.000,00	Rp6.375.000,00	Rp93.525.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp99.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp6.225.000,00	Rp6.375.000,00	Rp6.375.000,00	Rp93.525.000,00
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.171.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.171.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.171.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.171.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp182.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.820,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp56.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp932.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp932.080,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp82.229.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.229.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp82.229.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.229.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp76.429.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.429.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.600.000,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.268.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.268.080,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.268.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.268.080,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp373.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.524.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.524.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp22.577.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.577.880,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp4.042.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.042.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp15.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp11.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.200.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp12.531.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.531.920,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp12.531.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.531.920,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.406.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.406.920,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.125.000,00
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp43.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp56.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp24.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp24.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp24.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp40.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.650.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp40.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.650.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp84.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.850,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp112.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.902.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.902.950,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp18.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.150.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.150.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp18.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp130.149.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp128.874.360,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp95.149.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.149.360,00
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp39.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp39.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp39.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp15.149.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.149.360,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp15.149.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.149.360,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.149.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.149.360,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.549.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.549.360,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.549.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.549.360,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp508.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp508.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp112.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.578.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.578.860,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp392.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp392.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp112.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp495.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.200,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp33.725.000,00
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp33.725.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp33.725.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp33.725.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.300.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp16.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp5.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp5.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.050.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp5.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.050.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp13.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp12.375.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp13.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp12.375.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp1.275.000,00	Rp12.375.000,00
JUMLAH		Rp8.130.694.955,00	Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp89.654.951,00	Rp58.189.928,00	Rp147.844.879,00	Rp1.200.926.989,00	Rp6.929.767.966,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.654.951,00	Rp89.654.951,00	Rp89.654.951,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.082.110,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp12.176.314,00	Rp6.150.372,00	Rp18.326.686,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.326.686,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp3.169.102,00	Rp4.328.637,00	Rp7.497.739,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.497.739,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp15.345.416,00	Rp10.479.009,00	Rp25.824.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.997.257,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.757,00	Rp1.537.064,00	Rp1.783.821,00	Rp1.783.821,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.649,00	Rp67.904,00	Rp101.553,00	Rp101.553,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp909.386,00	Rp18.558.497,00	Rp19.467.883,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.467.883,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.765,00	Rp206.693,00	Rp287.458,00	Rp287.458,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp909.386,00	Rp18.558.497,00	Rp19.467.883,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.171,00	Rp1.811.661,00	Rp2.172.832,00	Rp21.640.715,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp90.000.000,00	Rp89.654.951,00	Rp179.654.951,00	Rp1.232.737.061,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.654.951,00	Rp58.189.928,00	Rp147.844.879,00	Rp147.844.879,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.082.110,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp12.176.314,00	Rp6.150.372,00	Rp18.326.686,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.326.686,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp3.169.102,00	Rp4.328.637,00	Rp7.497.739,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.497.739,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp15.345.416,00	Rp10.479.009,00	Rp25.824.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.997.257,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.757,00	Rp1.537.064,00	Rp1.783.821,00	Rp1.783.821,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.649,00	Rp67.904,00	Rp101.553,00	Rp101.553,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp909.386,00	Rp18.558.497,00	Rp19.467.883,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.467.883,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.765,00	Rp206.693,00	Rp287.458,00	Rp287.458,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp909.386,00	Rp18.558.497,00	Rp19.467.883,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.171,00	Rp1.811.661,00	Rp2.172.832,00	Rp21.640.715,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.293.780,00	Rp56.378.267,00	Rp145.672.047,00	Rp145.672.047,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp312.056.800,00	Rp617.973.002,00	Rp930.029.802,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.007.789.802,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp328.311.602,00	Rp647.010.508,00	Rp975.322.110,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp77.760.000,00	Rp89.654.951,00	Rp58.189.928,00	Rp147.844.879,00	Rp1.200.926.989,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.049,00	Rp31.465.023,00	Rp31.810.072,00	Rp31.810.072,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGUNA ANGGARAN

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

Tarjo, S.Sos, M.Si
NIP. 196508071986071001

SUMARNI
NIP. 198503222014062002



20
25

RAPOR TRIWULAN

Survei Kepuasan Masyarakat

000.8.3.4/0929/DISDUKCAPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
PERIODE JANUARI - MARET

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PENGGUNA LAYANAN

Pengguna Layanan merupakan orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang mengajukan permohonan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) untuk mendapatkan manfaat dari produk layanan dalam bentuk administrasi, jasa dan/atau barang. Dalam mengajukan permohonan layanan, Pengguna Layanan dan Petugas Layanan terikat oleh Standar Pelayanan untuk menjamin kepastian hukum dan kesamaan hak antar individu dalam memperoleh layanan yang adil, transparan dan akuntabel.

821

total pengguna

460: Januari
289: Februari
72: Maret

hasil penjumlahan secara menyeluruh atas data Pengguna Layanan yang terdaftar mengajukan permohonan dan telah menerima produk layanan melalui sistem informasi SKM Wonosobo atau sistem informasi layanan milik Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang diintegrasikan.

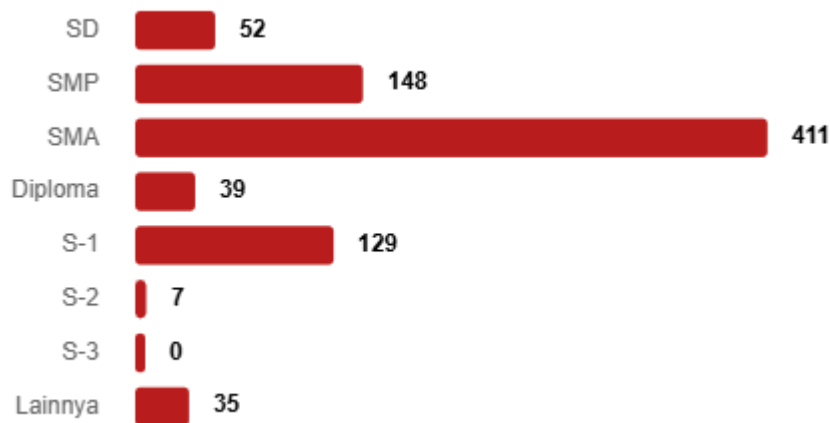
by GENDER



524: laki-laki
297: perempuan

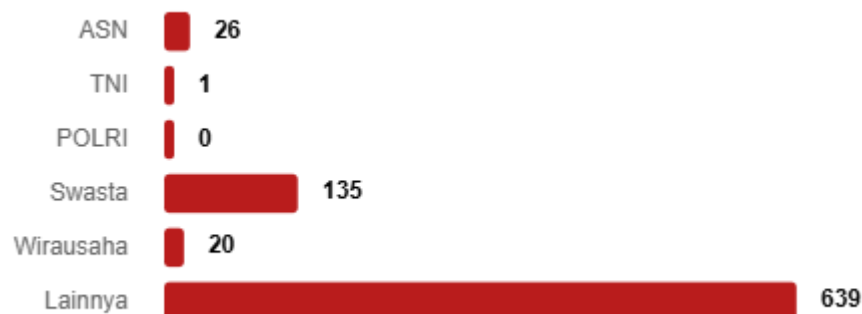
pemetaan berdasarkan jenis kelamin membantu memahami distribusi akses layanan antara laki-laki dan perempuan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa Pelayanan Publik telah menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara inklusif.

by PENDIDIKAN



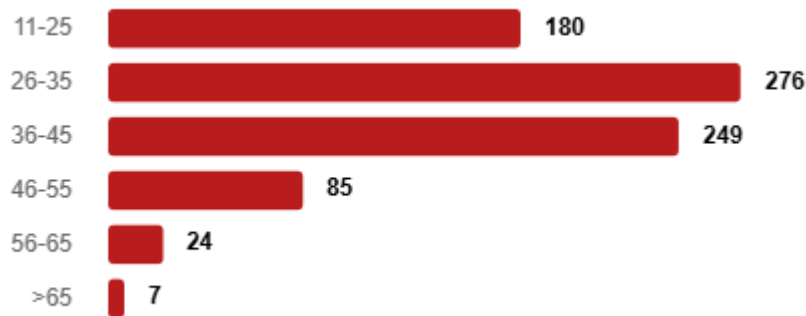
pemetaan pendidikan terakhir Pengguna Layanan memberi gambaran kemampuan literasi digital berkaitan dengan Standar Pelayanan untuk menyusun strategi penyederhanaan informasi, panduan layanan atau peningkatan literasi layanan berbasis teknologi.

by PEKERJAAN



klasifikasi berdasarkan pekerjaan memperlihatkan latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang mengakses layanan, salah satunya untuk membantu menyesuaikan jam operasional, kanal layanan, hingga jenis bantuan teknis yang diperlukan sesuai dengan aktivitas harian pengguna.

by USIA



pengelompokan usia Pengguna Layanan menggambarkan siapa saja yang dominan menggunakan layanan, apakah didominasi usia produktif, generasi muda, atau mungkin kelompok lansia. Data ini penting untuk merancang pendekatan layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok usia tertentu.

FREKUENSI PELAYANAN



menggambarkan intensitas Pengguna Layanan sebagai indikasi beban kerja pelayanan permohonan yang secara strategis dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kebijakan layanan dan profesionalisme sumber daya manusia.

POPULARITAS LAYANAN

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI	191
2	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH,PERUBAHAN DATA RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI	128
3	AKTA KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 61 HARI (AKTA TPD)	98
4	PELAYANAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI	96

No	Jenis Layanan	Jumlah
5	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PERUBAHAN DATA	84
6	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-60 HARI (AKTA RUTIN)	73
7	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI	53
8	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA HILANG ATAU RUSAK	41
9	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANG UNTUK ORANG ASING (OA)	41
10	PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI	7
11	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI	4
12	PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI	3
13	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU	1
14	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT	1

ragam jenis layanan permohonan yang digunakan oleh masyarakat mencerminkan variasi kebutuhan publik terhadap urusan administrasi, barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

PETUGAS LAYANAN

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	ROZIYAH	502
2	TONI AGUS TRIYONO	81
3	TRI RAHAYU	65
4	MUCHAMAT SAEFUDIN	47
5	NIKEN UTAMI	43
6	FANDI AHMAD NURUDDIN	36
7	SAPTO AJI PURNOMO	17
8	FAIZ AMRILLAH	13

No	Jenis Layanan	Jumlah
9	OCTAMAWATI SULISTINA RH	9
10	TRI WAHYUNI	5
11	ARUM WARDHANI	2
12	INTAN NOFYANA RIZKI PUTRI	1

jumlah Pengguna Layanan yang dilayani oleh setiap Petugas Layanan mencerminkan distribusi tugas sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi untuk memberikan penghargaan yang selaras dengan beban kerja. Data ini juga membantu UPP dalam mengatur penjadwalan Petugas Layanan sesuai dengan intensitas permohonan, juga berfungsi untuk mengelola strategi pelayanan yang berbasis manual maupun elektronik.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui persepsi kepuasan Pengguna Layanan terhadap serangkaian proses layanan permohonan yang mengacu pada Standar Pelayanan. Pengguna Layanan sebagai salah satu subjek dalam Pelayanan Publik dapat menjadi responden survei secara sukarela untuk berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi, masukan dan kritik dalam rangka membangun pelayanan inklusif.

Capaian Survei



Dari kebutuhan **262** sampel telah tercapai **120%**

821
pengguna layanan

315
responden survei

IKM

94.22
predikat: A

responden survei merupakan Pengguna Layanan yang secara sukarela bersedia mengisi 9 (sembilan) unsur pertanyaan serta memberikan kritik maupun saran sebagai masukan yang membangun. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi angka yang mencerminkan persepsi kepuasan Pengguna Layanan setelah memenuhi kebutuhan sampel terhadap total Pengguna Layanan. Semakin tinggi persentase capaian survei, maka semakin baik kualitas data SKM untuk menganalisis kebutuhan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan kemampuan pemerintah.

by GENDER

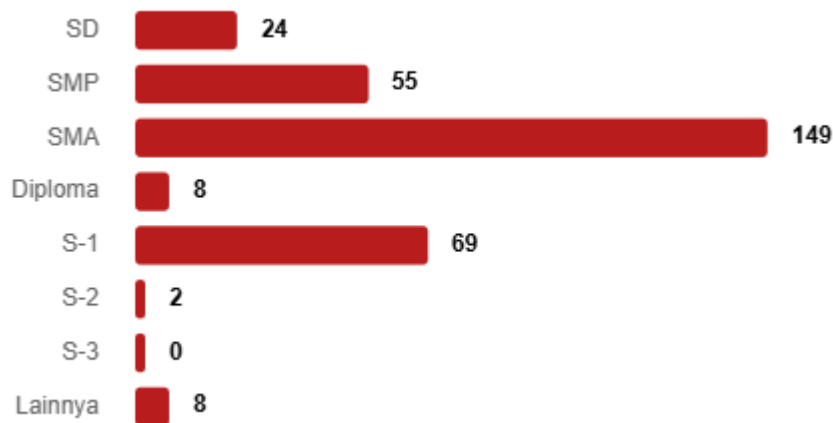


185: laki-laki

130: perempuan

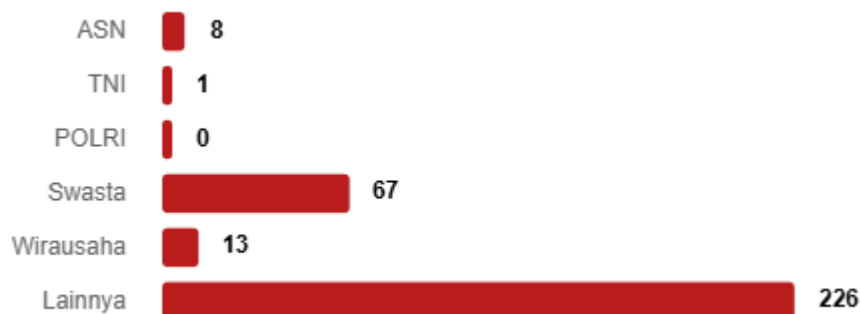
jenis kelamin responden menggambarkan sebaran partisipasi Pengguna Layanan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan telah menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara inklusif serta mendorong kesetaraan gender dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat.

by PENDIDIKAN



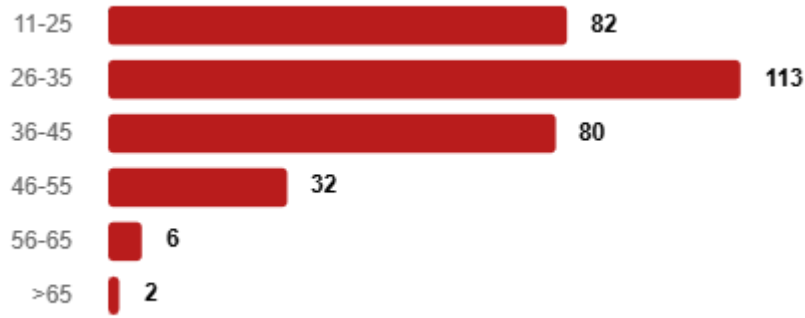
pendidikan terakhir responden memberi gambaran kemampuan literasi digital Pengguna Layanan yang ikut berkontribusi dalam SKM, sehingga strategi kebijakan pelayanan yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara relevan.

by PEKERJAAN



klasifikasi berdasarkan pekerjaan responden membantu perumusan kebijakan pelayanan terutama dalam aspek penyesuaian jam operasional, penyediaan kanal layanan sesuai dengan aspirasi responden sebagai representasi masyarakat.

by USIA



pengelompokan usia responden menggambarkan siapa saja yang berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan Pelayanan Publik yang berkualitas apakah didominasi usia produktif, generasi muda, atau mungkin kelompok lansia. Data ini penting untuk perumusan kebijakan peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan kelompok usia tertentu.

IKM LAYANAN

No	Jenis Layanan	Pengguna	Survei	IKM
1	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI	191	54	91.56
2	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH,PERUBAHAN DATA RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI	128	58	96.41
3	AKTA KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 61 HARI (AKTA TPD)	98	28	93.95
4	PELAYANAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI	96	36	91.74
5	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PERUBAHAN DATA	84	26	91.24
6	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-60 HARI (AKTA RUTIN)	73	21	93.92
7	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI	53	27	93.62
8	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA HILANG ATAU RUSAK	41	20	96.53
9	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANG UNTUK ORANG ASING (OA)	41	37	97.90
10	PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI	7	4	97.92
11	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI	4	1	97.22
12	PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI	3	1	100.00
13	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU	1	1	100.00
14	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT	1	1	97.22

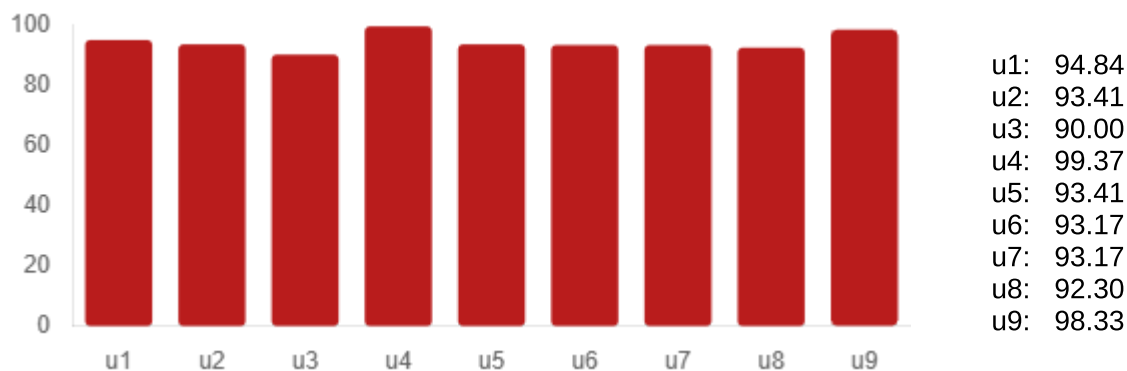
menggambarkan nilai persepsi kepuasan Pengguna Layanan per jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPP, angka ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan perbaikan Standar Pelayanan berbasis data kuantitatif maupun kualitatif.

IKM PETUGAS LAYANAN

No	Nama	Pengguna	Survei	IKM
1	ROZIYAH	502	138	91.59
2	TONI AGUS TRIYONO	81	71	97.77
3	TRI RAHAYU	65	37	96.47
4	MUCHAMAT SAEFUDIN	47	33	94.36
5	NIKEN UTAMI	43	14	98.02
6	FANDI AHMAD NURUDDIN	36	1	91.67
7	SAPTO AJI PURNOMO	17	2	95.83
8	FAIZ AMRILLAH	13	2	93.06
9	OCTAMAWATI SULISTINA RH	9	9	93.21
10	TRI WAHYUNI	5	5	95.00
11	ARUM WARDHANI	2	1	100.00
12	INTAN NOFYANA RIZKI PUTRI	1	1	91.67

menggambarkan nilai persepsi kepuasan Pengguna Layanan terhadap kompetensi Petugas Layanan dan perilaku kesopanan dan keramahan Petugas Layanan per Petugas Layanan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan maupun pembinaan sumber daya manusia.

by UNSUR



unsur-unsur SKM merupakan komponen pertanyaan untuk mengukur kualitas penyampaian layanan meliputi kesesuaian persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian layanan, biaya/tarif, kemudahan prosedur serta pengelolaan layanan terdiri dari kompetensi petugas, perilaku kesopanan dan keramahan petugas, sarana prasarana dan pengelolaan pengaduan (masing-masing secara berurutan merupakan unsur 1 - unsur 9).

3 UNSUR TERENDAH

Unsur	Uraian	IKM
Unsur 3	Waktu Penyelesaian	90.00
Unsur 8	Sarana dan Prasarana	92.30
Unsur 6	Kompetensi Pelaksana	93.17

merupakan unsur-unsur yang mendapat nilai terendah sebagai prioritas perbaikan kualitas layanan yang diselaraskan dengan data saran dan masukan responden SKM maupun data aduan masyarakat terhadap layanan permohonan. Dalam rapor SKM triwulanan, ketiga nilai unsur terendah tersebut masih dapat mengalami perubahan urutan dimana dalam laporan tahunan SKM sebagai hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL).

FREKUENSI SURVEI



menggambarkan jumlah responden survei dari waktu ke waktu, untuk mendorong UPP maupun masyarakat sebagai Pengguna Layanan agar secara aktif berkontribusi dalam membangun Pelayanan Publik di Wonosobo yang lebih baik. Tentu upaya ini perlu mendapatkan dorongan dan komitmen dari Pimpinan UPP untuk senantiasa mendorong para Petugas Layanan agar secara persuasif mengajak pemohon yang telah selesai dilayani dalam pengisian SKM.

- Rapor SKM Triwulanan digunakan untuk memantau perkembangan data Pengguna Layanan serta progres capaian survei secara berkelanjutan untuk memacu persaingan positif antar UPP dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik.
- Data ini dapat digunakan sebagai bukti dukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara triwulanan bagi Pimpinan UPP maupun ASN yang ditugaskan sebagai Petugas Layanan, perlu diperhatikan bahwa perolehan IKM triwulanan merupakan angka yang bersifat sementara. Adapun target akhir IKM yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan nilai rata-rata Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- Rapor ini disusun secara otomatis menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai data pada 290425-07:57:39.

Wonosobo, 2 Mei 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



TARJO S, Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001